

Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Jakarta Utara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi gudang Bulog di Jakarta Utara untuk mengecek stok beras nasional.

"Pertama saya ingin memastikan bahwa stok nasional untuk beras cukup, tadi Pak Kabulog menyampaikan bahwa stok yang ada di Bulog 1,373 juta ton, artinya stok kita cukup," kata Presiden

Jokowi, di gudang Bulog Jakarta, seperti disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (21/7).

Selain mengecek stok, Presiden Jokowi juga ingin memastikan kesiap-

an untuk program bansos beras. "Kedua, saya juga mengecek mengontrol kesiapan dari bantuan beras yang akan diberikan kepada masyarakat," kata Presiden lagi.

Menurut Presiden, distribusi bansos beras tersebut sudah dilakukan sejak 16 Juli 2021. "Saya senang karena ternyata ini sudah berjalan sejak hari Jumat lalu. Jadi

bukan akan, tapi sudah berjalan sejak Jumat lalu di Jakarta dan seluruh provinsi di negara kita," ujar Presiden.

Pemberian bansos beras tersebut pun menurut Presiden akan terus berjalan. "Ini 10 kilogram, kita harap dengan bantuan beras ini, bisa membantu rakyat karena kita dalam penerapan PPKM (Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)," kata Presiden sambil menunjukkan karung beras bertuliskan "Beras Bulog MEDIUM" dengan stiker "Bantuan beras PPKM Darurat 2021" neto 10 kg.

Selain bantuan beras, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan sosial lainnya. "Tapi selain beras ini kan juga ada subsidi listrik, bansos tunai, kemudian BLT (Bantuan Langsung Tunai) desa, kemudian subsidi untuk internet, PKH (Program Keluarga Harapan) dan lain-lain. Saya rasa itu yang ingin saya cek pagi hari ini," ujar Presiden pula.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 55,21 triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak karena penerapan PPKM. (ANTARA)



ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/aa

Presiden Joko Widodo memperlihatkan kantong beras saat meninjau Pergudangan Bulog untuk memastikan stok beras nasional di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/7).

Pemda DIY Segera Bangun Instalasi Generator Oksigen

YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta segera membangun instalasi generator oksigen untuk meningkatkan kapasitas pasokan oksigen medis bagi sejumlah rumah sakit di provinsi itu.

"Pemerintah DIY berencana membangun generator oksigen tiga buah. Harapannya, satu sampai satu setengah bulan mendatang, sudah bisa dioperasionalkan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji dalam sesi wawancara dengan wartawan secara virtual di Yogyakarta, Rabu (21/7).

Ia menargetkan tiga instalasi generator oksigen tersebut mampu mengisi 400 sampai 500 tabung gas oksigen berukuran besar setiap hari. Saat ini, menurut Aji, DIY telah memperoleh bantuan 100 unit oksigen konsentrator dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Dengan penambahan itu, katanya, saat ini total oksigen konsentrator di provinsi itu sudah mencapai 500 unit lebih yang diharapkan bisa membantu mengatasi ketergantungan rumah sakit terhadap pasokan oksigen.

"Sudah bisa memenuhi kebutuhan lima juta liter (oksigen cair) untuk rumah sakit, sementara kebutuhan kita 24 juta liter sehingga kekurangan itu bisa kita atasi dengan oksigen konsentrator," kata dia.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Oksigen DIY Tri Saktiyana menuturkan pembangunan instalasi generator oksigen akan berlokasi di Kompleks Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna DIY, yang memiliki sejumlah petugas teknis untuk mendukung pembangunan instalasi itu. "Ini sudah proses (pembangunan), kami masih memilih jenis-jenisnya, nanti kami segera eksekusi," kata dia.

Menurut dia, instalasi generator oksigen memiliki cara kerja menyedot udara di lingkungan sekitarnya. Udara itu kemudian dipadatkan dan dimasukkan ke tabung. Tri optimistis dengan beroperasinya generator oksigen itu ke depan sudah tidak ada lagi kelangkaan oksigen. Seluruh kebutuhan oksigen rumah sakit di DIY diyakini bisa tercukupi dengan catatan kasus konfirmasi positif COVID-19 tidak terus meningkat.

"Dengan catatan di hulunya tidak tambah. Kalau hulunya (kasus konfirmasi positif) bisa kembali seperti pertengahan Juni 2021, saya pastikan tidak ada kelangkaan oksigen," kata dia. (ANTARA)



ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/baww

Ilustrasi. Petugas Sudin Sumber Daya Air DKI Jakarta memindahkan tabung oksigen ke bak truk di salah satu pabrik pengisian oksigen kawasan Cakung, Jakarta.

Jelang Penyelenggaraan PON, Gubernur Papua Minta Kebut Vaksinasi

JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepala daerah di wilayahnya untuk menggebut pelaksanaan vaksinasi guna mewujudkan kekebalan kelompok, menjelang diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2021.

Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus di Jayapura, Rabu (21/7), mengatakan sebagai tuan rumah PON XX dan Peparas XVI, pihaknya akan terus berupaya agar opsi kehadiran penonton dapat menyemarakkan kedua pergelaran tersebut.

"Untuk itu, Gubernur Papua Lukas Enembe juga berpesan kepada bupati dan wali kota se-Provinsi Papua agar dapat menggebut dan menambah akselerasinya dalam melakukan vaksinasi kepada seluruh warga di Papua, demi tercapainya kekebalan kelompok menjelang PON XX Papua 2021 dan Peparas XVI Papua 2021 yang akan diselenggarakan 73 hari lagi," katanya.

Menurut Rifai Darus, Lukas Enembe mengharapkan agar bupati dan wali kota se-Provinsi Papua dapat menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah maupun yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

"Hal ini bertujuan untuk memperlancar persiapan penyelenggaraan PON XX Papua 2021 dan Peparas XVI Papua 2021 serta lebih jauh lagi untuk menyelamatkan setiap nyawa penduduk di Tanah Papua dari ancaman virus COVID-19," ujarnya.

Dia menjelaskan terkait dengan penutupan akses keluar-masuk Provinsi Papua akan dikuculkan pada aktivitas yang berhubungan dengan PON XX Papua 2021 dan Peparas XVI Papua 2021.

Sebelumnya, pada Senin, 19 Juli 2021, Gubernur Papua Lukas Enembe beserta kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia menghadihi rapat terbatas melalui video konferensi yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo berkenaan dengan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia.

Pascarapat terbatas bersama presiden tersebut, Gubernur Lukas Enembe selanjutnya pada hari yang sama mengumpulkan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua dengan agenda yang berkenaan pandemi COVID-19 di Provinsi Papua.

Gubernur Papua Lukas Enembe akan melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro di Provinsi Papua, sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Papua Nomor: 440/7736/SET.

Surat edaran tersebut masih berlaku hingga 25 Juli 2021, untuk itu Gubernur Papua meminta kepada seluruh pemangku kepentingan terkait agar dapat bersinergi dan bergerak lebih cepat dan tepat guna memastikan situasi pandemi COVID-19 di Tanah Papua tidak semakin parah. (ANTARA)



Mendagri Terbitkan Instruksi PPKM Level 4 Jawa-Bali

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 untuk wilayah Jawa dan Bali.

Mendagri Tito Karnavian dalam Inmendagri Nomor 22/2021, di Jakarta, Rabu (21/7), menjelaskan instruksi dikeluarkan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM level 4 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali.

"Sesuai dengan kriteria level situasi pandemik berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro serta mengoptimalkan Posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19," tulis Inmendagri.

Pada instruksi kali ini ditetapkan sejumlah daerah yakni kabupaten dan kota

dengan status level 3 atau 4 di wilayah Jawa dan Bali. Baca juga: Perpanjangan PPKM demi memutus penyebaran COVID-19

Bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk kategori berlevel 3 atau 4, tetap diberlakukan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Pada Inmendagri kali ini juga dijelaskan aturan pembatasan, baik pembatasan kegiatan masyarakat maupun aturan kerja dari kantor ataupun kerja dari rumah.

Inmendagri juga mengatur soal alokasi vaksin, mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, serta edukasi terkait COVID-19.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021. (ANTARA)

Walikota Semarang: Sudah Tidak Ada Penumpukan Pasien di RS

SEMARANG - Walikota Semarang Hendrar Prihadi menyebut sudah tidak ada lagi penumpukan pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit yang ada di Ibu Kota Jawa Tengah itu setelah dua pekan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), sejak 3 sampai 20 Juli 2021.

"Tidak ada penumpukan pasien. Rata-rata ketersediaan tempat tidur di rumah sakit saat ini sekitar 57 persen," kata walikota yang akrab disapa Hendi tersebut di Semarang, Rabu (21/7).

Jumlah tersebut, lanjut dia, jauh berkurang jika di banding dua pekan lalu yang sempat mencapai 94 persen. "Dari 21 rumah sakit di Kota Semarang, hanya tiga yang masih penuh. RS Permata Medika,

Telogorejo dan Panti Wiloso," ujarnya.

Bahkan, menurut dia, tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah pusat isolasi COVID-19 sudah mencapai 24 persen. Meski demikian, tingkat keterisian pasien di ruang unit gawat darurat masih relatif tinggi, yakni mencapai 84 persen.

PPKM sendiri, kata dia, diputuskan diperpanjang hingga 25 Juli 2021, termasuk di Kota Semarang. Ia menuturkan hal tersebut merupakan kebijakan yang sulit, namun harus dilakukan untuk menekan jumlah kasus COVID-19.

Meski jumlah kasus COVID-19 di Kota Semarang sudah mulai menurun, kata dia, Ibu Kota Jawa Tengah ini masih masuk dalam kategori PPKM level 4. (ANTARA)

ANTARA NEWS

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran terkait penertiban pelaksanaan PPKM Darurat dan percepatan vaksinasi. Melalui aturan ini, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah diarahkan bertindak tegas, persuasif, dan humanis dalam menegakkan peraturan PPKM.

PPKM YANG TEGAS DAN HUMANIS

DASAR PELAKSANAAN

Surat Edaran nomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan PPKM Darurat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat

ARAHAN KEPADA GUBERNUR, BUPATI/WALI KOTA

1. Mengevaluasi penertiban pelaksanaan PPKM secara reguler.
2. Memerintahkan jajaran Satpol PP untuk mengutamakan langkah yang profesional, humanis dan persuasif dengan:
 - Penertiban sesuai Instruksi Mendagri tentang PPKM.
 - Penegakan hukum/disiplin secara tegas, santun dan simpatik.
 - Dilarang menggunakan kekerasan.
 - Bersinergi dengan TNI/Polri.
3. Membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi akibat pandemi dan PPKM.
4. Melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat:
 - Mengalihkan alokasi vaksin dari daerah yang kelebihan ke wilayah yang kekurangan.
 - Dinas kesehatan tidak menimbun stok vaksin dan segera menyuntikkan kepada masyarakat sesuai prioritas.
5. Melakukan sosialisasi masif penerapan 5M:
 - Menggunakan masker
 - Mencuci tangan
 - Menjaga jarak
 - Menghindari kerumunan
 - Mengurangi mobilitas

Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri

"Keselamatan rakyat adalah yang utama, ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan menyelamatkan rakyat, untuk kita semua."